

PENGARUH FAKTOR ORGANISASI TERHADAP TINGKAT PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Novi Kurnia Rini

novikurniarini@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to test empirically the influence of human resources quality, organization commitment, and accounting information system to the rate of implementation of accrual based Government Accounting Standard on Local Apparatus Work Unit (SKPD) of Surabaya city. Quantitative method has been applied as the method. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The data has been obtained by issuing 90 questionnaires to the employees of financial management at Local Apparatus Work Unit of Surabaya city. 84 of 90 questionnaires have returned to the researcher and 82 questionnaires (91%) have been filled in complete and can be processed. The data which have been collected is processed by using multiple linear regressions analysis. The result of the research shows that human resources quality, organization commitment, and accounting information system have positive influence to the rate of implementation of accrual based government accounting standard. The result of the research support the hypothesis which has been purposed that human resources quality, organization commitment, and accounting information system have positive influence to the rate of implementation of accrual based government accounting standard on Local Apparatus Work Unit (SKPD) of Surabaya city.

Keywords : *Human Resource Quality, Organization Commitment, Accounting Information System, Accrual Accounting*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan bersumber dari penyebaran 90 kuesioner kepada pegawai pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Sebanyak 84 kuesioner kembali dan 82 kuesioner (91%) diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada SKPD Kota Surabaya.

Kata kunci : *Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi akuntansi, akuntansi akrual*

PENDAHULUAN

Dalam reformasi pengelolaan keuangan Negara, akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Perkembangan tersebut terkait dengan kebijakan sistem akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perkembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam penyediaan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah.

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia diawali dengan diberlakukannya paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Ketentuan dalam Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. SAP dirumuskan dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP menyelesaikan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang digunakan sebagai pedoman awal penyusunan laporan keuangan oleh instansi pemerintah.

PP Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu, PP Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti, sehingga diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual secara penuh. Berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010 merubah secara signifikan sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Akuntansi berbasis akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan setiap transaksi keuangan dan kejadian lainnya pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa mempertimbangkan waktu kas atau setara kas telah diterima atau dikeluarkan. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis akrual menjadi lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya tercatat. Penggunaan akuntansi berbasis akrual menjadi salah satu ciri dari perubahan sistem manajemen sektor publik dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang lebih transparan.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, namun karena kondisi pemerintah yang kurang memadai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilaksanakan sepenuhnya sejak awal tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 pada lampiran kedua. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor organisasi yang ada dalam organisasi pemerintah, faktor organisasi tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, serta komunikasi.

Penelitian mengenai penerapan SAP berbasis akrual menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Hal tersebut terjadi karena perbedaan situasi dan kondisi objek penelitian. Hasil dari penelitian Trisnawati (2013) menunjukkan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan penelitian Adventana (2014) menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan, tetapi teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Berbeda dengan hasil penelitian Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah, dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap satuan kerja memiliki tugas yang sama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan oleh setiap satuan kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkenaan dengan adanya SAP berbasis akrual, maka Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan pedoman bagi seluruh SKPD di Kota Surabaya dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2015. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Walikota tersebut menandakan bahwa seluruh SKPD di Kota Surabaya wajib untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah faktor organisasi yang meliputi kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada SKPD Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh faktor organisasi yang meliputi kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada SKPD Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORETIS

Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah mencakup tiga hal, yaitu hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak merupakan bentuk penerimaan yang mampu meningkatkan kekayaan daerah. Halim (2002: 19) berpendapat bahwa semua hak merupakan hak untuk memungut sumber-sumber pemerintah daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, atau hak untuk menerima sumber-sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Kewajiban adalah bentuk pengeluaran yang mampu menurunkan kekayaan daerah. Kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang guna membayar tagihan-tagihan atas kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Organisasi Pengelola Keuangan Daerah

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh: (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. SKPKD merupakan unit kerja pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan; dan (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit kerja pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, yang kemudian digunakan oleh SKPKD sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemakaian dana APBD.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Landasan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara; (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005; (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah; (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (15) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Basis akuntansi akruaI adalah pencatatan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi ekonomi, dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem akuntansi berbasis akruaI. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, sistem akuntansi pemerintah berbasis akruaI adalah sistem akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan fiskal berbasis akruaI, sedangkan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu berbasis kas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik dapat berupa laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang menyajikan rincian berupa penjelasan lebih lanjut tentang pos-pos laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Ketujuh laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga organisasi sektor publik wajib menyajikan ketujuh laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Faktor Organisasi

Frambach dan Schillewaert (dalam Indriyanti, 2010) secara rinci mengidentifikasi faktor organisasional, yaitu semua upaya organisasi untuk meningkatkan penguasaan dan mempromosikan inovasi ke semua unit organisasi. Upaya-upaya ini meliputi pelatihan, dukungan teknis, dan persuasi sosial, dan komitmen pimpinan dalam implementasi inovasi. Pelatihan terutama terkait dengan pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan teknis yang berupa pengembangan terhadap Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Komitmen Organisasi dalam implementasi inovasi. Inovasi dalam hal ini adalah pengembangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, dan pemberian pendidikan. Adapun dukungan teknis, meliputi ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan SAP berbasis akruaI. Organisasi juga perlu memiliki komitmen yang kuat dan jelas terhadap keberhasilan implementasi SAP berbasis akruaI. Semua upaya organisasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten, baik sebelum implementasi ataupun ketika implementasi telah berlangsung.

Wiley (dalam Trisnawati, 2013: 28) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting, karenanya kualitas atau mutu dari sumber daya tersebut harus dikelola dan dikembangkan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi

tertinggi seperti kecerdasan, kreatifitas, dan imajinasi, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, dan sebagainya (Ndraha, 1997: 12).

Robbins (2002: 15) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Allen dan Meyer (dalam Heriyanti, 2007: 36) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu afektif, normatif dan kontinuan. Pegawai dengan komponen afektif tinggi masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu pegawai dengan komponen kontinuan tinggi tetap bergabung dengan organisasi karena mereka membutuhkan organisasi. Pegawai yang memiliki komponen normatif tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Informasi sangat penting bagi setiap badan usaha, termasuk untuk organisasi pemerintahan. Semua sistem informasi memiliki karakteristik umum, yaitu bertumbuh atau berkembang sepanjang masa, mempunyai jaringan arus informasi, melaksanakan tugas-tugas yang perlu sehubungan dengan data, menyediakan informasi kepada berbagai pemakai untuk berbagai tujuan, dan menggunakan berbagai sumber daya. Sistem informasi memiliki kesamaan dengan jaringan komunikasi, dimana keduanya sama-sama menyediakan informasi ke berbagai pihak didalam atau diluar organisasi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasi informasi keuangan dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak intern.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani dalam Kusuma, 2013). SDM memiliki peran yang penting dalam penerapan SAP berbasis akrua, karena SDM merupakan penggerak dari kebijakan yang diimplementasikan. Kemampuan SDM perlu dikembangkan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan, dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2013), Adventana (2014), Sukadana dan Mimba (2015) membuktikan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrua. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat dari anggota organisasi untuk melakukan suatu perbuatan yang mampu menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat pada satuan kerja di instansi pemerintah akan mendukung penerapan SAP berbasis akrua. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar tujuan organisasi mencapai keberhasilan. Bekerja maksimal dalam hal ini adalah bekerja keras, ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasinya. Apabila pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan keterlibatan mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnawati (2013) dan Adventana (2014) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual akan didukung oleh infrastruktur dan sarana yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, dimana sistem informasi akuntansi akan memudahkan organisasi dalam pelaksanaan dan pengawasan transaksi ekonomi. Penelitian yang telah dilakukan Trisnawati (2013) membuktikan bahwa SIA berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: (1) Para pegawai pengelola keuangan pada SKPD Kota Surabaya, (2) Kepala dan Staf bagian akuntansi/keuangan, dan (3) Sekretaris, Kepala Sub-bidang, dan Staf. SKPD yang diteliti terdiri atas 30 SKPD. Setiap SKPD masing-masing terdiri dari tiga responden. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 90 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Tingkat penerapan SAP berbasis akrual merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh unit kerja di instansi pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 pernyataan yang akan dijawab oleh responden menggunakan Skala Likert, dimana jawaban responden dibedakan atas 5 skala. Sangat Setuju (5), Setuju (4), Tidak Tahu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh SKPD. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin, agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu dan teknologi, serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukannya dan yang telah dipercayakan kepadanya. Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 pernyataan yang akan dijawab oleh responden menggunakan Skala Likert, dimana jawaban responden dibedakan atas 5 skala. Sangat Setuju (5), Setuju (4), Tidak Tahu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Komitmen organisasi merupakan elemen yang mendukung terciptanya kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu organisasi, semakin tinggi komitmen dari pemimpin dan anggota organisasi akan semakin mudah upaya dalam pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, baik pemimpin maupun anggota dari suatu organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan 4 pernyataan yang akan dijawab oleh responden menggunakan Skala Likert, dimana jawaban responden dibedakan atas 5 skala. Sangat Setuju (5), Setuju (4), Tidak Tahu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya sistem informasi akuntansi akan memudahkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu perkembangan sistem informasi akuntansi harus mengikuti perkembangan kebijakan yang dibuat oleh organisasi, agar informasi yang dihasilkan memberikan informasi yang akurat dan relevan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 pernyataan yang akan dijawab oleh responden menggunakan Skala Likert, dimana jawaban responden dibedakan atas 5 skala. Sangat Setuju (5), Setuju (4), Tidak Tahu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu penulis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$SAP = a + \beta_1 SDM + \beta_2 KO + \beta_3 SIA + e$$

Keterangan:

SAP = Tingkat penerapan SAP berbasis akrual

SDM = Kualitas sumber daya manusia

KO = Komitmen organisasi

- SIA = Sistem informasi akuntansi
a = Konstanta
 β_x = beda atau koefisien regresi dari variabel independen
e = kesalahan residual

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji kualitas data diantaranya uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah memenuhi uji kualitas data kemudian dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Setelah semua data dinyatakan lolos uji asumsi klasik maka dilanjutkan dengan melakukan uji kelayakan model (uji F), analisis koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis (uji t).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pemerintahan Kota Surabaya dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 22 tanggal 10 Juli 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Uji Validitas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari tanggapan 82 responden mengenai 6 pertanyaan pada variabel kualitas sumber daya manusia, 4 pertanyaan pada variabel komitmen organisasi, 10 pertanyaan pada variabel sistem informasi akuntansi, dan 10 pertanyaan pada variabel tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual kemudian diolah menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil olahan data yang disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	N	Nilai Signifikansi Berdasarkan Perhitungan SPSS	Nilai Signifikansi	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	SDM1	82	0,000	0,05	Valid
	SDM2	82	0,000		Valid
	SDM3	82	0,008		Valid
	SDM4	82	0,000		Valid
	SDM5	82	0,000		Valid
	SDM6	82	0,000		Valid
Komitmen Organisasi	KO1	82	0,000	0,05	Valid
	KO2	82	0,000		Valid
	KO3	82	0,000		Valid
	KO4	82	0,000		Valid
Sistem Informasi Akuntansi	SIA1	82	0,000	0,05	Valid
	SIA2	82	0,000		Valid
	SIA3	82	0,000		Valid
	SIA4	82	0,000		Valid
	SIA5	82	0,000		Valid
	SIA6	82	0,000		Valid
	SIA7	82	0,000		Valid
	SIA8	82	0,000		Valid
	SIA9	82	0,000		Valid
	SIA10	82	0,000		Valid
Tingkat Penerapan SAP Berbasis Akrua	SAP1	82	0,000	0,05	Valid
	SAP2	82	0,000		Valid
	SAP3	82	0,000		Valid
	SAP4	82	0,000		Valid
	SAP5	82	0,014		Valid
	SAP6	82	0,000		Valid
	SAP7	82	0,000		Valid
	SAP8	82	0,000		Valid
	SAP9	82	0,000		Valid
	SAP10	82	0,000		Valid

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas yang digambarkan pada tabel 1 diatas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada semua variabel bernilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga data SDM, KO, SIA, dan SAP dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari tanggapan 82 responden mengenai 6 pertanyaan pada variabel kualitas sumber daya manusia, 4 pertanyaan pada variabel komitmen organisasi, 10 pertanyaan pada variabel sistem informasi akuntansi, dan 10 pertanyaan pada variabel tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual kemudian diolah menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil olahan data yang disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,616	0,60	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,636	0,60	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi	0,824	0,60	Reliabel
Tingkat Penerapan SAP Berbasis Akruar	0,710	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS

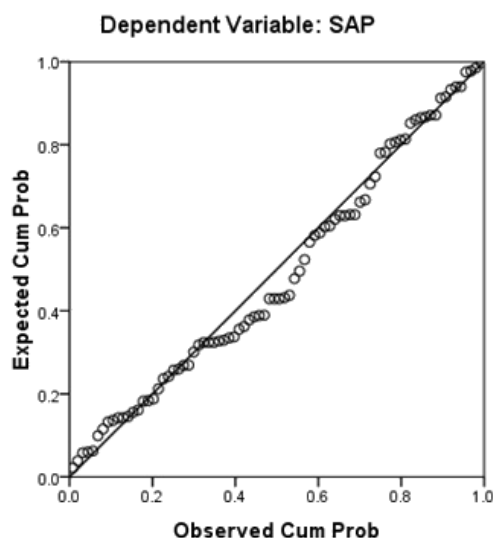
Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel dalam penelitian yang digambarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner data SDM, KO, SIA, dan SAP dianggap Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam pengujian ini menggunakan uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Berdasarkan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti garis diagonal antara 0 dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) dan sumbu X (*Observed Cum Prob*). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Output SPSS

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka dinyatakan terjadi gejala Multikolinearitas. Berdasarkan persamaan regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS, adapun hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

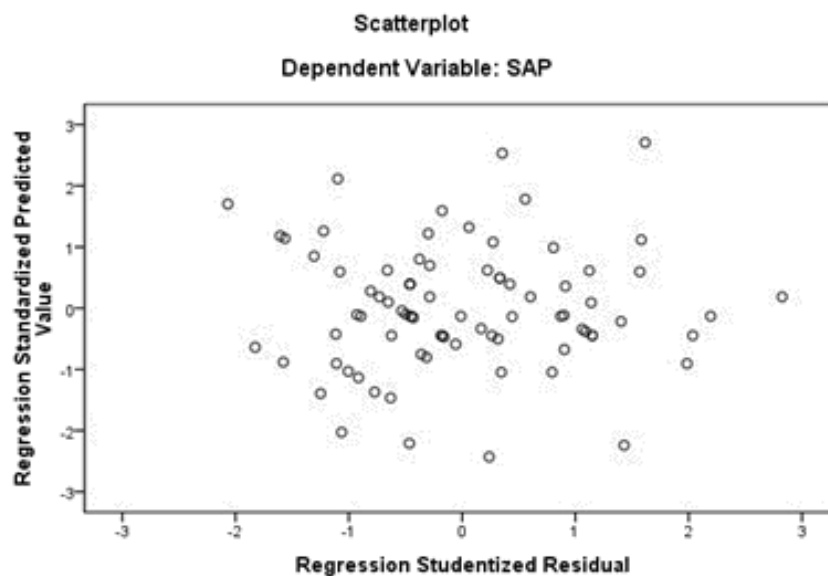
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,768	1,302	Non-Multikolinearitas
Komitmen Organisasi	0,611	1,636	Non-Multikolinearitas
Sistem Informasi Akuntansi	0,656	1,524	Non-Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS

Dari perhitungan estimasi korelasi matrik dengan program SPSS menunjukkan bahwa nilai *tollerance* dari seluruh variabel dependen lebih besar dari 0,10. Dan nilai VIF semua variabel dependen lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala korelasi antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang digunakan adalah grafik *scatterplot*. Penetuanannya berdasarkan penyebaran data (titik), jika titik-titik menyebar membentuk pola tertentu maka diindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Hasil dari grafik *scatterplot* menunjukkan tidak adanya pola-pola yang jelas, maka dapat diindikasikan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Regresi linear berganda, hasil perhitungan dengan bantuan program komputer SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	1.173	.390				3.011
SDM	.269	.081	.325	3.332	.001	.768	1.302
KO	.247	.101	.267	2.446	.017	.611	1.636
SIA	.201	.094	.225	2.134	.036	.656	1.524

a. Dependent Variable: SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$SAP = 1,173 + 0,269 \text{ SDM} + 0,247 \text{ KO} + 0,201 \text{ SIA} + e$$

Koefisien regresi dari variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi adalah bertanda positif yang berarti variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang searah dengan variabel tingkat penerapan SAP berbasis akrual. Apabila SDM, KO, dan SIA semakin ditingkatkan maka akan meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual, dan sebaliknya jika SDM diturunkan maka akan menurunkan penerapan SAP berbasis akrual.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk menguji ketepatan model, dengan menguji apakah variabel SDM, KO, dan SIA secara bersama-sama mempengaruhi variabel SAP.

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.099	3	1.033	19.715	.000 ^a
	Residual	4.087	78	.052		
	Total	7.185	81			

a. Predictors: (Constant), SIA, SDM, KO

b. Dependent Variable: SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Uji ANOVA diatas dan melakukan uji dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 95% dengan alpha (α) = 0,05, diperoleh nilai F_{sign} 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai α lebih besar dari nilai F_{sign} ($0,05 > 0,000$). Model regresi dinyatakan layak, atau dapat diartikan model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel SDM, KO, dan SIA terhadap variabel SAP.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh variabel SDM, KO, dan SIA terhadap SAP. Hasil perhitungan dengan bantuan program komputer SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.431	.409	.22890

a. Predictors: (Constant), SIA, SDM, KO

b. Dependent Variable: SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 43,1%. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), komitmen organisasi (KO), dan sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh sebesar 43,1% dan sisanya 56,9% dijelaskan oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis adalah pengujian dari masing-masing koefisien regresi yang berarti juga pengujian pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.173	.390		3.011	.004
	SDM	.269	.081	.325	3.332	.001
	KO	.247	.101	.267	2.446	.017
	SIA	.201	.094	.225	2.134	.036

a. Dependent Variable: SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 diatas dan melakukan uji dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 95% dengan alpha (α) = 0,05, diperoleh hasil bahwa setiap variabel independen yaitu, kualitas sumber daya manusia (0,001), komitmen organisasi (0,017), dan sistem informasi akuntansi (0,036) memiliki nilai t_{sign} lebih kecil dari alpha (α). Hasil analisis ini membuktikan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan SAP berbasis akrual sehingga hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kota Surabaya dan

hubungannya positif. Pengaruh antara kualitas sumber daya manusia dengan tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah semakin bagus kualitas sumber daya manusia maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin meningkat, yang berarti bahwa tujuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel akan segera terwujud.

Teori yang dikemukakan Wiley (dalam Trisnawati, 2013: 28) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut, dalam penelitian ini tujuan organisasi yang dimaksudkan adalah penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada tingkat SKPD Kota Surabaya. Sedangkan untuk penelitian sekarang ini berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SKPD Kota Surabaya.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diperkuat oleh kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kota Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Siagian dalam Juita (2013) bahwa tinggi rendahnya komitmen organisasi akan sangat menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi, komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Komitmen yang tinggi akan membuat individu organisasi bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini tujuan organisasi berkaitan dengan keberhasilan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada tingkat SKPD Kota Surabaya. Sedangkan untuk penelitian sekarang ini berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis komitmen organisasi (KO) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat penerapan SAP pada SKPD Kota Surabaya.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diperkuat oleh kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kota Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Midjan dan Susanto (2003: 11) bahwa sistem informasi akuntansi adalah seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas informasi dalam hal ini sesuai dengan tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan untuk penelitian sekarang ini berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis sistem informasi akuntansi (SIA) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat penerapan SAP pada SKPD Kota Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini berarti mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan SAP berbasis akrual.

Saran

Saran yang dapat penulis ajukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya tetap memperhatikan tingkat penerapan SAP berbasis akrual pada masing-masing SKPD karena hasil yang diperoleh belum cukup memuaskan (2) Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventana, G. A. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Heriyanti, D. 2007. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriyanti, I. 2010. Pengaruh Faktor Organisasional, Individual, dan Sosial terhadap Penerimaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan Melalui Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat. *Tesis*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Juita, S. D. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Negeri Padang. Padang.
- Kusuma, M. I. Y. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 2(3): 17-31.
- Midjan, L. dan A. Susanto. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi I*. Lembaga Informatika Akuntansi. Bandung.
- Ndraha, T. 1997. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- _____. Nomor 64 Tahun 2013 *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. 6 Desember 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- _____. Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.

- ____ Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- ____ Nomor 38 Tahun 2007 *Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. 9 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Jakarta.
- ____ Nomor 41 Tahun 2007 *Organisasi Perangkat Daerah*. 23 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Jakarta.
- ____ Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 *Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. 30 Mei 2014. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 33. Surabaya.
- Robbins, P. S. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Sukadana, I. C. dan N. P. S. H. Mimba. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12(1): 35-49.
- Trisnawati, W. I. 2013. Pengaruh Kualitas Sumbey Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di SKPD Kabupaten Tulungagung. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Jakarta.
- ____ Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- ____ Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- ____ Nomor 25 Tahun 2004 *Sistem Perencanaan Pembangunan Negara*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta.
- ____ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- ____ Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.